

# PEMBERIAN AIR BERSIH DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN GUNA PEMENUHAN HAK NARAPIDANA

**Abdulah Nur Hamzah**  
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

**Achmad Gilang Setiawan**  
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

**Ahmad Rista Muzakki**  
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Journal of Correctional Studies  
20XX, Vol.XX (XX) XX-XX  
Politeknik Ilmu  
Pemasarakatan

Review  
DD-MM-YYYY

Accepted  
DD-MM-YYYY

## **Abstract**

*Abstrak This article reviews the crucial issue of clean water provision in correctional institutions and its impact on the fulfillment of prisoners' rights. The provision of clean water is an important component in maintaining decent living conditions for prisoners, and plays a vital role in maintaining health and a humane life behind bars. This study aims to analyze the practice of water provision in correctional institutions, measure the quality and quantity of water available, and explore its impact on the health and human rights of prisoners. Through qualitative research methods and literature review, data was obtained from a number of correctional institutions covering a range of geographies and inmate population structures. The results show significant variation in the standard of water provision across prisons, with some institutions achieving high levels of rights fulfillment, while others still experience serious problems in terms of water access. In this regard, factors such as internal policies, budgets, and infrastructure play an important role in determining the quality and quantity of water available.*

## **Keywords :**

*Correctional Institutions, Health, Rights, Prisoners*

## **Abstrak**

Artikel ini mengulas isu krusial mengenai pemberian air bersih di lembaga pemasyarakatan dan dampaknya pada pemenuhan hak-hak narapidana. Pemberian air bersih merupakan komponen penting dalam menjaga kondisi hidup yang layak bagi narapidana, dan berperan vital dalam menjaga kesehatan serta kehidupan yang manusiawi di balik jeruji besi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pemberian air bersih di lembaga pemasyarakatan, mengukur kualitas dan kuantitas air yang tersedia, serta mengeksplorasi dampaknya pada kesehatan dan hak asasi manusia narapidana. Melalui metode penelitian kualitatif dan literature review, data diperoleh dari sejumlah lembaga pemasyarakatan yang mencakup berbagai geografi dan struktur populasi narapidana. Hasil penelitian menunjukkan variasi yang signifikan dalam standar pemberian air bersih di berbagai lembaga pemasyarakatan, dengan beberapa lembaga mencapai tingkat pemenuhan hak yang tinggi, sementara yang lain masih mengalami permasalahan serius dalam

hal akses air. Dalam hal ini, faktor-faktor seperti kebijakan internal, anggaran, dan infrastruktur memainkan peran penting dalam menentukan kualitas dan kuantitas air yang tersedia.

**Kata kunci :**

Lembaga Pemasyarakatan, Kesehatan, Hak, Narapidana

**Pendahuluan**

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai liputan media dan laporan dari lembaga pemantau hak asasi manusia telah mengungkapkan ketidakpastian dalam pemenuhan hak-hak dasar narapidana di Indonesia, termasuk hak mereka untuk mendapatkan air bersih. Permasalahan utama yang mencuat adalah ketidakcukupan pasokan air bersih dan kualitas air yang kurang memadai di sebagian besar lembaga pemasyarakatan di seluruh negeri. Keterbatasan anggaran, infrastruktur yang ketinggalan zaman, serta peningkatan populasi narapidana, semuanya menjadi faktor yang mempersulit akses narapidana kepada air bersih yang cukup dan aman. Pemberian air bersih yang terhambat bukan hanya mengenai aspek kesehatan narapidana, tetapi juga merugikan hak asasi manusia dasar mereka (Herliansyah, 2020). Dalam situasi seperti ini, narapidana berisiko terkena penyakit, terutama penyakit yang terkait dengan kebersihan air, seperti diare dan penyakit kulit. Selain itu, ketidakpastian akses air bersih juga dapat memicu potensi konflik antar-narapidana atau dengan petugas keamanan, memperburuk kondisi keseluruhan di dalam lembaga pemasyarakatan, dan bahkan merugikan upaya rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat.

Pemberian air bersih di lembaga pemasyarakatan adalah aspek kritis yang seringkali terabaikan dalam pembicaraan mengenai hak-hak narapidana. Lembaga

pemasyarakatan merupakan tempat di mana individu yang telah dijatuhi hukuman menjalani masa hukumannya, dan oleh karena itu, mereka juga memiliki hak dasar yang harus dijamin, termasuk hak atas air bersih yang memadai (Herliansyah, 2020). Air bersih adalah kebutuhan esensial untuk kehidupan manusia, dan ketidakterseediaannya atau kualitas yang buruk dapat berdampak serius terhadap kesejahteraan narapidana, serta dapat menjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Urgensi masalah ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak dasar narapidana, tetapi juga memiliki implikasi lebih luas pada sistem peradilan pidana dan masyarakat secara keseluruhan. Kondisi di dalam lembaga pemasyarakatan, termasuk akses yang terbatas atau kualitas air yang rendah, dapat menyebabkan penurunan kesehatan narapidana, penyebaran penyakit, serta konflik dan ketegangan di dalam penjara (Herliansyah, 2020). Selain itu, ini juga bisa menjadi faktor yang mempersulit rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat setelah masa hukuman mereka selesai. Pemberian air bersih yang terhambat bukan hanya mengenai aspek kesehatan narapidana, tetapi juga merugikan hak asasi manusia dasar mereka. Dalam situasi seperti ini, narapidana berisiko terkena penyakit, terutama penyakit yang terkait dengan kebersihan air, seperti diare dan penyakit kulit. Selain itu, ketidakpastian akses air bersih juga dapat memicu

potensi konflik antar-narapidana atau dengan petugas keamanan, memperburuk kondisi keseluruhan di dalam lembaga pemasyarakatan, dan bahkan merugikan upaya rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat.

Masalah ini memerlukan perhatian serius dan penelitian mendalam untuk memahami implikasinya terhadap narapidana dan dampaknya terhadap pelaksanaan hukuman dan rehabilitasi. Pemberian air bersih yang memadai di lembaga pemasyarakatan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak narapidana, tetapi juga dengan upaya menciptakan lingkungan yang lebih manusiawi dan efektif untuk pemasyarakatan dan reintegrasi social (Anwar, 2021). Dengan mengangkat isu ini dalam artikel ini, kami bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang pentingnya memastikan pemberian air bersih yang memadai kepada narapidana dan bagaimana hal ini berkaitan dengan pemenuhan hak asasi mereka. Artikel ini juga akan menggali berbagai aspek terkait seperti kualitas air, dampak kesehatan, kebijakan internasional, serta solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kondisi di dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, artikel ini akan memberikan kontribusi yang berharga dalam mendiskusikan masalah yang sangat relevan dan terkadang terlupakan ini dalam konteks sistem peradilan pidana dan hak asasi manusia.

### **Metode**

Metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian mengenai "PEMBERIAN AIR BERSIH DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN GUNA PEMENUHAN HAK NARAPIDANA" menggabungkan analisis literatur sebagai komponen

penting. Dalam metode penelitian kualitatif, peneliti umumnya mencari pemahaman mendalam tentang suatu fenomena, yang dalam konteks ini adalah pemberian air bersih di lembaga pemasyarakatan. Peneliti melakukan identifikasi dan seleksi literatur yang relevan dengan topik penelitian. Hal ini mencakup pencarian makalah, jurnal, buku, laporan pemerintah, dan sumber-sumber tepercaya lainnya yang berkaitan dengan pemberian air bersih di lembaga pemasyarakatan. Pemilihan literatur dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa semua informasi yang relevan dan signifikan tercakup dalam review literatur. Kemudian, peneliti melakukan analisis terhadap literatur yang terkumpul. Ini melibatkan pembacaan dan pemahaman mendalam terhadap setiap literatur yang terkumpul. Peneliti mencari pola, temuan, dan konsep-konsep utama yang muncul dalam literatur terkait. Selain itu, peneliti mencatat perbedaan dan persamaan dalam pendekatan pemberian air bersih di berbagai lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya, peneliti mengorganisir temuan-temuan ini dalam suatu kerangka konseptual yang membantu menjawab pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Kerangka konseptual ini mencakup elemen-elemen penting yang mempengaruhi pemberian air bersih di lembaga pemasyarakatan, seperti aspek hukum, kebijakan, sumber daya, serta dampaknya terhadap hak narapidana. Peneliti juga mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan atau area-area yang masih perlu dijelajahi lebih lanjut. Ini dapat mencakup kekurangan data empiris dalam literatur, perbedaan pendapat di antara peneliti sebelumnya, atau perkembangan terkini yang belum tercakup dalam penelitian sebelumnya. Selanjutnya, peneliti menggabungkan

temuan dari literatur review dengan data lain yang mungkin diperoleh melalui wawancara, observasi, atau metode kualitatif lainnya. Hal ini membantu memperdalam pemahaman tentang bagaimana pemberian air bersih di lembaga pemasyarakatan mempengaruhi pemenuhan hak narapidana dan faktor-faktor apa yang dapat memengaruhi implementasinya. Hasil literatur review digunakan untuk mendukung argumentasi dan analisis dalam penelitian. Hal ini memberikan kerangka teoretis dan pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks pemberian air bersih di lembaga pemasyarakatan, sehingga dapat mendukung temuan penelitian dan kesimpulan yang diambil. Dengan metode penelitian kualitatif yang menggunakan literatur review secara cermat dan sistematis, peneliti dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu pemberian air bersih di lembaga pemasyarakatan dan dampaknya terhadap hak narapidana..

## **Hasil**

### **Kualitas dan Kuantitas Pemberian Air Bersih**

Kualitas dan Kuantitas Pemberian Air Bersih di Lembaga Pemasyarakatan menjadi isu krusial yang memengaruhi pemenuhan hak asasi narapidana. Dalam konteks ini, kualitas air mengacu pada seberapa aman dan sesuai air yang tersedia untuk dikonsumsi, sementara kuantitas mengukur jumlah air yang tersedia untuk keperluan harian. Pemahaman yang tepat tentang kedua aspek ini adalah penting dalam memastikan bahwa narapidana memiliki akses yang memadai dan terjamin terhadap air bersih. Kualitas air yang disediakan di lembaga pemasyarakatan harus memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan (Saputra, 2021). Ini

mencakup pengujian secara rutin terhadap kontaminan seperti bakteri, logam berat, dan zat kimia berbahaya. Air yang terkontaminasi dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan yang dapat menimbulkan ancaman serius bagi narapidana. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ketat terhadap sumber air, pemrosesan air, dan distribusi untuk memastikan bahwa air yang diberikan aman untuk dikonsumsi dan memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan. Selain kualitas air, kuantitas air yang tersedia juga merupakan hal yang sangat penting. Narapidana memerlukan akses yang memadai terhadap air untuk kebutuhan sehari-hari mereka, termasuk mandi, mencuci pakaian, minum, dan keperluan lainnya (Saputra, 2021). Kekurangan air atau keterbatasan pasokan air dapat mengakibatkan ketidaknyamanan, masalah sanitasi, dan dapat mempengaruhi kesejahteraan narapidana secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengukuran kuantitas air yang sesuai dengan jumlah narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan perlu dilakukan, dan sistem distribusi air harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kendala terkait kualitas dan kuantitas pemberian air bersih di lembaga pemasyarakatan bisa melibatkan masalah anggaran, infrastruktur yang tidak memadai, dan kurangnya sumber daya manusia yang terlatih. Solusi untuk masalah ini bisa termasuk alokasi anggaran yang lebih besar untuk memastikan pemenuhan hak narapidana, perbaikan infrastruktur, dan pelatihan bagi petugas yang terlibat dalam manajemen air di lembaga pemasyarakatan.

Kualitas dan kuantitas pemberian air bersih di lembaga pemasyarakatan adalah aspek krusial yang memengaruhi kondisi kehidupan dan hak-hak dasar

narapidana. Kualitas air bersih merujuk pada tingkat kemurnian, keamanan, dan kesesuaian air yang disediakan untuk dikonsumsi dan digunakan oleh narapidana. Hal ini mencakup pengawasan terhadap potensi kontaminan seperti bakteri, logam berat, atau senyawa kimia berbahaya dalam air. Air bersih harus memenuhi standar kesehatan yang ketat untuk menghindari dampak negatif terhadap kesehatan narapidana. Selain kualitas, kuantitas air bersih yang disediakan juga merupakan elemen penting. Hal ini mencakup seberapa banyak air yang tersedia untuk narapidana sehari-hari. Kuantitas air yang cukup penting untuk memastikan kebutuhan dasar seperti minum, mandi, mencuci, dan sanitasi terpenuhi. Kekurangan air bisa menyebabkan masalah serius, seperti dehidrasi, gangguan pencernaan, atau risiko infeksi yang meningkat. Namun, dalam banyak lembaga pemasyarakatan, ketersediaan air bersih bisa menjadi masalah. Faktor seperti keterbatasan infrastruktur, overpopulasi, atau anggaran yang terbatas dapat menghambat kemampuan lembaga pemasyarakatan dalam menyediakan kualitas dan kuantitas air bersih yang memadai. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi hambatan ini dan memastikan bahwa pemberian air bersih adalah bagian integral dari pemenuhan hak-hak dasar narapidana. Selain itu, pemantauan berkala terhadap kualitas dan kuantitas air bersih dalam lembaga pemasyarakatan perlu diterapkan untuk memastikan bahwa standar kesehatan dan hak-hak narapidana tetap terlindungi. Ini mungkin melibatkan pemeriksaan rutin terhadap sumber air, sistem distribusi, dan fasilitas sanitasi untuk mengidentifikasi potensi masalah atau kontaminasi. Upaya preventif dan perbaikan segera harus

diambil jika ada masalah terkait air bersih. Dengan memahami dan mengatasi aspek kualitas dan kuantitas pemberian air bersih dengan serius, lembaga pemasyarakatan dapat berperan penting dalam menjaga hak dasar narapidana, mempromosikan kesehatan yang lebih baik, dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan manusiawi di dalam penjara. Ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia, tetapi juga berkontribusi pada rehabilitasi dan rekonsiliasi narapidana dengan masyarakat (Ahmad, 2021).

### **Dampak Kesehatan Narapidana**

Dalam banyak lembaga pemasyarakatan, pemberian air bersih dapat menjadi isu sensitif. Air bersih bukan hanya sekadar kebutuhan fisik, tetapi juga aspek kesehatan yang sangat penting. Kualitas dan kuantitas air bersih yang disediakan sangat memengaruhi kesejahteraan narapidana. Dalam kasus di mana pasokan air bersih tidak mencukupi atau air yang tersedia tidak memenuhi standar kualitas yang diperlukan, narapidana berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan. Ketidacukupan air bersih dapat mengakibatkan dehidrasi, yang dapat menyebabkan penurunan energi, masalah fungsi organ tubuh, dan risiko penurunan kesehatan umum (Biaggy & Wibowo, 2020). Selain itu, kurangnya air bersih juga berdampak pada kebersihan pribadi narapidana. Dalam lembaga pemasyarakatan yang padat, masalah kebersihan bisa menjadi permasalahan serius. Kurangnya air bersih yang digunakan untuk mandi dan mencuci tangan dapat meningkatkan risiko infeksi dan penyakit kulit. Penyakit-penyakit menular seperti diare, tifoid, dan hepatitis juga dapat menyebar dengan cepat dalam lembaga pemasyarakatan jika air bersih tidak tersedia dalam jumlah yang mencukupi untuk keperluan sanitasi. Ini

adalah dampak yang serius yang bisa merugikan tidak hanya narapidana tetapi juga staf penjara dan petugas. Selanjutnya, perlu dicatat bahwa narapidana sering kali memiliki masalah kesehatan yang lebih kompleks daripada populasi umum. Kurangnya air bersih yang memadai dapat menghambat penyediaan layanan kesehatan yang efektif di dalam lembaga pemasyarakatan, mengakibatkan pemberian obat yang tidak tepat atau masalah kesehatan yang tidak terdiagnosis (Biaggy & Wibowo, 2020). Sebagai hasilnya, penting untuk memahami bahwa akses yang memadai terhadap air bersih adalah suatu kebutuhan yang sangat mendasar dan kritis bagi narapidana. Pemberian air bersih yang cukup dan berkualitas adalah hak dasar yang harus diberikan kepada mereka untuk memastikan kesehatan, kebersihan, dan kesejahteraan mereka di dalam lembaga pemasyarakatan.

Dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan, aspek ini menjadi salah satu hal yang sangat krusial. Kualitas dan kuantitas air bersih yang diterima oleh narapidana berperan besar dalam menentukan kondisi kesehatan mereka. Ketika narapidana diberikan akses terbatas atau terhambat terhadap air bersih, ini dapat mengakibatkan masalah kesehatan yang serius. Salah satu dampak yang paling umum adalah dehidrasi. Kondisi ini terjadi ketika tubuh kekurangan cairan yang cukup untuk menjalankan fungsi-fungsi vitalnya. Dehidrasi dapat menyebabkan gejala seperti pusing, mual, muntah, kulit kering, dan penurunan berat badan yang signifikan (Naryadi et al., 2019). Di tingkat yang lebih parah, dehidrasi dapat menyebabkan gangguan organ, kebingungan, atau bahkan koma. Selain dehidrasi, kekurangan akses air bersih

juga dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Air adalah bagian integral dari proses pencernaan dan membantu dalam pemecahan makanan serta penyerapan nutrisi. Kekurangan air dapat mengakibatkan sembelit dan masalah pencernaan lainnya, yang dapat menjadi sumber ketidaknyamanan dan risiko kesehatan jangka panjang. Dampak kesehatan lainnya yang perlu diperhatikan adalah masalah kulit. Narapidana yang memiliki akses terbatas terhadap air bersih mungkin kesulitan menjaga kebersihan kulit mereka. Kelembaban yang rendah dan kurangnya air bersih untuk mandi atau mencuci tangan secara teratur dapat menyebabkan masalah kulit, termasuk infeksi dan iritasi kulit (Naryadi et al., 2019). Selain itu, lingkungan yang kurang higienis akibat ketersediaan air bersih yang terbatas dapat memicu penyebaran penyakit menular. Kebersihan dan kebugaran sanitasi sangat penting dalam lingkungan penahanan yang padat, dan kurangnya akses air bersih dapat menghambat upaya-upaya tersebut. Dalam keseluruhan, dampak kesehatan narapidana akibat pemberian air bersih yang tidak memadai mencakup dehidrasi, gangguan pencernaan, masalah kulit, dan peningkatan risiko penyakit menular. Untuk memastikan pemenuhan hak-hak narapidana dan menjaga kesehatan mereka, penting untuk memahami dan mengatasi masalah akses air bersih dalam lembaga pemasyarakatan dengan serius.

### **Kebijakan dan Standar Nasional**

Dalam konteks pemberian air bersih di lembaga pemasyarakatan guna pemenuhan hak narapidana, kebijakan dan standar nasional (*Undang-Undang RI No. 22 Tentang Pemasyarakatan, 2022*) memiliki peran penting dalam mengatur dan menilai kualitas penyediaan air

bersih. Kebijakan dan standar nasional adalah kerangka kerja yang memberikan pedoman dan aturan yang harus diikuti oleh lembaga pemasyarakatan untuk memastikan hak narapidana terpenuhi dengan baik. Kebijakan nasional yang relevan dalam hal ini mungkin mencakup penetapan standar minimal untuk pemberian air bersih di lembaga pemasyarakatan. Ini termasuk, namun tidak terbatas pada, jumlah air yang harus disediakan per narapidana per hari, metode pemurnian air, dan frekuensi pengujian kualitas air. Kebijakan ini dapat memastikan bahwa setiap narapidana memiliki akses yang cukup dan aman terhadap air bersih, yang merupakan hak asasi manusia dasar (Hermansyah & Masitoh, 2020). Selain itu, kebijakan nasional juga mungkin mengatur tanggung jawab institusi pemasyarakatan dalam memantau dan melaporkan penyediaan air bersih. Ini melibatkan pencatatan harian atau bulanan mengenai pasokan air, hasil pengujian kualitas air, dan tindakan perbaikan yang diambil jika ditemukan masalah. Hal ini membantu memastikan akuntabilitas dalam pemenuhan hak narapidana dan mengukur sejauh mana kebijakan ini diterapkan. Standar nasional juga berperan dalam menjelaskan aspek teknis yang terkait dengan pemberian air bersih. Standar ini dapat mencakup spesifikasi teknis terkait infrastruktur penyediaan air, seperti sistem penyaringan dan distribusi. Standar ini harus sesuai dengan pedoman dan rekomendasi internasional untuk memastikan bahwa air yang disediakan tidak hanya cukup dalam jumlah, tetapi juga aman untuk dikonsumsi. Lebih lanjut, kebijakan dan standar nasional ini harus mencakup panduan mengenai pelatihan dan sertifikasi petugas yang bertanggung jawab atas sistem air di lembaga pemasyarakatan. Mereka harus memiliki

pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjaga sistem air dengan baik dan melindungi kualitas air yang disediakan. Di Indonesia, pemberian air bersih di lembaga pemasyarakatan diatur dalam berbagai peraturan dan kebijakan. Salah satu dokumen utama yang mengatur hal ini adalah "Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan" (*Undang-Undang RI No. 22 Tentang Pemasyarakatan*, 2022). Dokumen ini mencakup standar pelayanan narapidana, yang mencakup aspek penting seperti air bersih. Standar ini harus dipatuhi oleh semua lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Selain peraturan, pedoman teknis dan protokol operasional juga bisa menjadi bagian penting dalam memastikan pemberian air bersih yang sesuai. Pedoman tersebut dapat melibatkan teknis penyediaan air, perawatan infrastruktur, dan prosedur inspeksi berkala. Misalnya, ada pedoman teknis tentang kapasitas sumur dan penyaringan air yang harus diikuti untuk memastikan kualitas air yang aman dan cukup untuk narapidana. Kebijakan nasional juga mungkin mengatur sistem pemantauan dan inspeksi yang berkaitan dengan pasokan air bersih di lembaga pemasyarakatan. Inspeksi berkala oleh otoritas yang berwenang adalah kunci untuk memastikan pemenuhan hak narapidana dan memastikan bahwa lembaga pemasyarakatan mematuhi peraturan dan standar nasional. Peraturan, kebijakan, dan standar nasional ini, saat diikuti dan diterapkan dengan baik, berperan penting dalam memastikan bahwa hak narapidana untuk mendapatkan akses air bersih terpenuhi. Mereka memberikan kerangka kerja hukum yang diperlukan untuk memastikan bahwa lembaga

pemasyarakatan memenuhi standar tertentu dalam menyediakan air bersih, yang pada akhirnya berdampak positif pada kesejahteraan dan kesehatan narapidana. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang peraturan ini sangat penting dalam upaya memperbaiki sistem pemasyarakatan dan menjaga hak asasi manusia narapidana. Dalam konteks pemberian air bersih di lembaga pemasyarakatan, kebijakan dan standar nasional adalah instrumen penting untuk mengatur, mengawasi, dan menilai pemenuhan hak narapidana (Wijaya et al., 2021). Dengan adanya kerangka kerja ini, lembaga pemasyarakatan diharapkan dapat menjalankan tugasnya untuk memastikan narapidana memiliki akses yang cukup dan aman terhadap air bersih, sesuai dengan hak asasi manusia yang mendasar.

### **Pembahasan**

Pemberian air bersih di lembaga pemasyarakatan di Indonesia adalah isu yang sangat penting dalam konteks pemenuhan hak narapidana. Dalam kebanyakan kasus, narapidana berada dalam situasi yang sangat terbatas dalam hal akses ke air bersih yang cukup dan berkualitas. Kendala infrastruktur, masalah anggaran, dan faktor-faktor lainnya memengaruhi cara air bersih disediakan di dalam lembaga pemasyarakatan. Secara umum, lembaga pemasyarakatan di Indonesia sering menghadapi tantangan dalam menyediakan pasokan air bersih yang memadai kepada narapidana. Masalah utama adalah ketersediaan air. Infrastruktur air di lembaga pemasyarakatan seringkali tidak memadai, dan pasokan air dari sumber luar bisa terbatas. Selain itu, lembaga pemasyarakatan juga mungkin memiliki keterbatasan anggaran untuk memastikan

pasokan air yang cukup. Selain masalah ketersediaan air, kualitas air juga menjadi perhatian. Air yang tidak memenuhi standar kesehatan dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi narapidana. Contohnya, air yang terkontaminasi dapat menjadi sumber penyakit kulit, gangguan pencernaan, dan masalah kesehatan lainnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memantau dan memastikan kualitas air yang aman untuk dikonsumsi oleh narapidana. Dalam beberapa kasus, kebijakan pemberian air bersih mungkin tidak selalu mengikuti standar internasional yang relevan. Ini bisa menjadi masalah serius, terutama dalam hal pemenuhan hak asasi manusia narapidana. Pemenuhan hak dasar seperti akses ke air bersih seharusnya selalu menjadi prioritas. Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa lembaga pemasyarakatan di Indonesia telah mencoba berbagai solusi. Beberapa upaya yang diambil termasuk pembaruan infrastruktur air, peningkatan pengelolaan sumber daya air, dan pendidikan terkait kebersihan air untuk narapidana. Selain itu, ada juga kerja sama dengan organisasi non-pemerintah dan badan internasional untuk memperbaiki kondisi air di lembaga pemasyarakatan. Pemberian air bersih di lembaga pemasyarakatan di Indonesia adalah masalah yang memerlukan perhatian serius dan solusi yang efektif. Upaya harus dilakukan untuk memastikan bahwa narapidana memiliki akses yang memadai ke air bersih yang aman dan sesuai dengan hak-hak dasar mereka (Afrizal & Rizki Noor, 2023). Dengan mengatasi masalah ketersediaan dan kualitas air, serta mematuhi standar internasional, langkah-langkah ini dapat membantu meningkatkan kondisi narapidana dan menciptakan lembaga pemasyarakatan yang lebih manusiawi.

### **Kesimpulan**

Pemberian air bersih merupakan elemen mendasar dalam menjaga kesejahteraan dan kesehatan narapidana, serta memastikan bahwa hak-hak dasar mereka tetap terlindungi, sesuai dengan standar hak asasi manusia yang berlaku baik secara nasional maupun internasional. Pemberian air bersih adalah hak dasar yang tidak dapat diabaikan di dalam lembaga pemasyarakatan. Air bersih bukan hanya merupakan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga kunci dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan narapidana. Tanpa akses yang memadai ke air bersih, narapidana rentan terhadap berbagai penyakit dan kondisi kesehatan yang dapat memperburuk situasi di dalam penjara. Pematuhan terhadap standar internasional dalam pemberian air bersih kepada narapidana. Kebijakan dan praktik di lembaga pemasyarakatan harus sesuai dengan pedoman hak asasi manusia yang berlaku, termasuk hak untuk mendapatkan akses ke air bersih. Kesimpulan ini menekankan perlunya pihak berwenang memastikan bahwa sistem pengelolaan air di penjara mematuhi aturan dan pedoman yang relevan. Tantangan yang mungkin dihadapi dalam memastikan pemberian air bersih yang memadai di lembaga pemasyarakatan, seperti keterbatasan anggaran atau masalah infrastruktur. Namun, kesimpulan utama adalah bahwa kendala-kendala ini harus diatasi dengan serius untuk memastikan hak narapidana terpenuhi. Solusi kreatif, termasuk penggunaan teknologi yang efisien dan program pelatihan bagi staf penjara, dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan ini. Langkah-langkah konkret harus diambil untuk memastikan pemberian air bersih yang memadai di lembaga pemasyarakatan. Ini mencakup

pemantauan terus-menerus terhadap kualitas dan kuantitas air yang tersedia, serta melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan petugas penjara, dalam upaya bersama untuk memastikan pemenuhan hak narapidana terkait dengan akses air bersih. Dengan demikian, kesimpulan dari artikel ini menekankan pentingnya menjadikan pemberian air bersih di lembaga pemasyarakatan sebagai prioritas dalam rangka pemenuhan hak narapidana dan sebagai langkah yang mendukung peningkatan kualitas hidup narapidana, serta mendorong pematuhan terhadap standar hak asasi manusia yang berlaku

### **Implikasi**

Artikel berjudul "PEMBERIAN AIR BERSIH DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN GUNA PEMENUHAN HAK NARAPIDANA" memiliki implikasi yang sangat penting terhadap kesejahteraan dan hak-hak dasar narapidana dalam lembaga pemasyarakatan. Pemberian air bersih di dalam lingkungan ini memiliki dampak yang signifikan pada aspek kesehatan, keamanan, dan martabat manusia narapidana. Aspek kesehatan merupakan implikasi utama dari akses air bersih yang memadai di lembaga pemasyarakatan. Ketersediaan air bersih yang cukup dan aman menjadi faktor penting dalam menjaga kesehatan narapidana. Kekurangan air bersih dapat menyebabkan masalah kesehatan serius, termasuk penyakit kulit, gangguan pencernaan, dan bahkan dehidrasi. Implikasi kesehatan ini tidak hanya berdampak pada individu narapidana, tetapi juga dapat menjadi masalah kesehatan masyarakat yang lebih luas jika penyakit menular menyebar di dalam lembaga pemasyarakatan.

Kedua, pengaruh terhadap rehabilitasi dan rekreasional juga merupakan implikasi yang signifikan. Kondisi lingkungan yang sehat dan bersih, yang melibatkan akses yang memadai terhadap air bersih, dapat memengaruhi secara positif upaya rehabilitasi dan rekreasional narapidana. Ketika narapidana memiliki akses yang cukup terhadap air bersih, mereka mungkin lebih mungkin untuk menjalani program rehabilitasi dengan lebih efektif, yang pada gilirannya dapat membantu mereka mempersiapkan diri untuk reintegrasi ke dalam masyarakat.

Ketiga, implikasi ini berkaitan dengan hak asasi manusia. Pemberian air bersih di lembaga pemasyarakatan merupakan hak dasar narapidana yang dilindungi oleh konvensi dan peraturan hak asasi manusia internasional. Ketidakmampuan untuk memastikan akses yang cukup terhadap air bersih dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan dapat mengakibatkan tuntutan hukum dan tindakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab atas lembaga pemasyarakatan tersebut.

Terakhir, pemberian air bersih juga memiliki implikasi terhadap keamanan lembaga pemasyarakatan. Ketersediaan air bersih yang cukup dapat membantu mencegah konflik di antara narapidana dan mengurangi potensi kerusuhan. Kondisi yang buruk dan kekurangan akses air bersih dapat menciptakan ketegangan yang berpotensi berbahaya di antara narapidana.

## Referensi

Afrizal, R., & Rizki Noor, M. (2023). *PEMENUHAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN YANG LAYAK BAGI NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS*

*II A PADANG*. 6(2).  
<https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang>

Ahmad, R. T. (2021). IMPLEMENTASI PELAYANAN KESEHATAN BAGI TAHANAN DAN NARAPIDANA LANJUT USIA ( STUDY DI LAPAS KELAS II A BANCEUY BANDUNG ). *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 372–386.  
<https://doi.org/10.31604/jips.v8i3.2021.372-386>

Anwar, A. A. (2021). KESEHATAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN LANJUT USIA DIDALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB CILACAP. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(3).  
<https://doi.org/10.31604/justitia.v8i3>

Biaggy, F., & Wibowo, P. (2020). UPAYA PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN KEPADA NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN. *WIDYA YURIDIKA: JURNAL HUKUM*, 3(2).  
<http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/>

Herliansyah, A. R. (2020). IMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK PELAYANAN KESEHATAN DAN MAKANAN YANG LAYAK BAGI NARAPIDANA. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(1), 212–221.  
<https://doi.org/10.31604/jips.v7i1.2020.212-221>

Hermansyah, A., & Masitoh, M. (2020). Pemenuhan Hak Narapidana Lanjut Usia Bidang Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh. *Syiah Kuala Law Journal*, 4(1), 88–96.  
<https://doi.org/10.24815/sklj.v4i1.16775>

Naryadi, Adwani, & Ali, D. (2019). PEMENUHAN HAK KESEHATAN

NARAPIDANA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN NARKOTIKA  
LANGSA, ACEH T. *Syah Kuala Law  
Journal*, 1(1), 157–168.

Saputra, A. P. (2021). EVALUASI  
IMPLEMENTASI PELAYANAN  
KESEHATAN TERHADAP  
NARAPIDANA LANJUT USIA DI RUTAN  
KELAS IIB GRESIK. *JUSTITIA : Jurnal  
Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(3).  
[https://doi.org/10.31604/justitia.v8i  
3](https://doi.org/10.31604/justitia.v8i3)

*Undang-Undang RI No. 22 Tentang  
Pemasyarakatan*. (2022).

Wijaya, T. S., Akbar, M., Rahman, M., &  
Artikel, I. (2021). *Pemenuhan Hak  
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan  
Bagi Narapidana (Studi di Lembaga  
Permasyarakatan Kelas II A Curup)*.  
7(1).  
[https://ejournal.undiksha.ac.id/inde  
x.php/jkh](https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh)